

ABSTRAK

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengisyaratkan bahwa Pemerintah ingin mencegah dan memberikan efek jera bagi pelanggar dengan menetapkan minimal ancaman pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dalam Putusan Nomor 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar. Dari putusan tersebut terdakwa dijatuhi sanksi pidana sangat jauh dari ancaman minimal yaitu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Apabila tidak berpedoman pada ancaman minimal dan maksimal pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dikhawatirkan amanah dan tujuan tidak tercapai yaitu efek jera pada pelanggar dan calon pelanggar. Dalam kedua putusan tersebut, keduanya dijatuhi pidana jauh di bawah minimal tanpa menyebut adanya alasan pembeda, pemaaf atau alasan yang meringankan. Apabila dicermati putusan menyebut memenuhi semua unsur yang ada dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang menentukan pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal pidana 15 (lima belas) tahun.

Adanya perbedaan interpretasi hakim dalam memahami ketentuan pidana minimum khusus menyebabkan adanya disparitas yang menonjol. Selain itu, penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yaitu: faktor hukum, faktor internal dan eksternal hakim, latar belakang terdakwa, peran terdakwa, rekam jejak terdakwa, tingkat pemahaman terdakwa, barang bukti, serta bobot volume satwa. Sehingga, penjatuhan sanksi pidana yang terlalu ringan di bawah batas minimum dapat melemahkan efek jera dan berpotensi terjadi *residivis* khususnya pada tindak pidana perdagangan satwa liar.

Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Disparitas, Pemidanaan, Perdagangan Satwa Liar

ABSTRACT

The enactment of Law Number 32 of 2024 as a replacement for Law Number 5 of 1990 indicates the Government's intention to prevent violations and create a deterrent effect by establishing minimum criminal sanctions within the new legal framework. In Decision Number 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby, the defendant was proven to have committed the crime of illegal wildlife trade. However, the sentence imposed was significantly lower than the prescribed minimum, namely 1 (one) year and 4 (four) months of imprisonment.

Failure to adhere to the minimum and maximum sentencing provisions stipulated in Law Number 32 of 2024 may undermine the objectives of the law, particularly in creating a deterrent effect for both offenders and potential offenders. In both examined decisions, the defendants were sentenced far below the statutory minimum without any explicit justification such as grounds for excuse, justification, or mitigating factors. Notably, the decisions affirm that all elements of Article 40A paragraph (1) letter d of Law Number 32 of 2024 were fulfilled, which prescribes a minimum sentence of 3 (three) years and a maximum of 15 (fifteen) years of imprisonment.

Differences in judicial interpretation regarding the application of minimum sentencing provisions have contributed to significant sentencing disparities. Furthermore, such disparities are influenced by various factors, including legal factors, internal and external aspects of judges, the defendant's background, role, criminal record, level of understanding, evidence presented, and the volume of wildlife involved. Consequently, the imposition of sentences below the minimum threshold may weaken the deterrent effect and increase the risk of recidivism, particularly in cases of illegal wildlife trade.

Keywords: Statutory Minimum Sentence, Disparity, Punishment, Wildlife Trade